

Pendidikan dan Faham Liberalisme

Moch. Tolchah¹

Abstrak

Lahirnya liberalisme tidak terlepas dari perkembangan mutakhir Barat sejak era *renaissance* dan *Aufklaerung*, yang secara *massive* mendasari berbagai perubahan besar dalam kultur dan peradaban Barat, sehingga dunia pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam struktur kebudayaan setiap bangsa dengan sendirinya juga tidak luput dari keharusan menyesuaikan diri dengan tuntutan liberalisasi.

Padahal, liberalisme yang *nota bene* menjadi penopang kemajuan Barat dengan berkembangnya sains, teknologisasi dan industrialisasinya juga menyisakan penderitaan dan krisis kemanusiaan, hingga menimbulkan respon keras dengan lahirnya sosialisme-komunisme

Tulisan ini mencoba menelusuri sejauh mana implikasi liberalisme terhadap pendidikan. Selain itu tulisan ini juga diarahkan dalam rangka penelusuran terhadap berbagai dampak positif dan negatifnya. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat membangun sikap kritis terhadapnya.

Kata Kunci: Aufklaerung, Komunisme, Liberalisme, Progresifisme

A. Pendahuluan

Liberalisme merupakan paradigma berfikir dan kebudayaan yang tengah menjadi *mainstream* dunia. Dimana atmosfer pemikiran maupun konstelasi kemanusiaan kontemporer didominasi paradigma liberal ini. Berbagai perubahan yang melahirkan idiom-idiom global, seperti kebebasan pers, pasar bebas, serta demokrasi, nampaknya tidak dapat dilepaskan dari liberalisme sebagai titik tolaknya. Idiom-idiom tersebut secara imperatif memaksakan perubahan di berbagai kawasan dunia,

¹ Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mahasiswa Program Doktorat IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam bidang Pendidikan Islam.

tidak hanya dalam hal tatanan politik dan ekonomi, melainkan juga pada budaya, bahkan agama sekalipun.

Runtuhnya komunisme yang kadang juga dimaknai sebagai kekalahan sosialisme yang pada kurun modern berdiri sebagai pesaing politik utamanya di tingkat global maupun domestik menempatkan liberalisme sebagai satu-satunya paradigma yang harus “diimani” dan “diamini” seluruh negara, bangsa dan umat manusia. Peradaban dunia seolah harus menerima tegaknya tata nilai kemanusiaan baru menggantikan nilai-nilai tradisional yang berkembang sebelumnya, di mana liberalisme sebagai pilar utamanya.

Dunia pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam struktur kebudayaan setiap bangsa dengan sendirinya juga tidak luput dari keharusan menyesuaikan diri dengan tuntutan liberalisasi. Padahal, liberalisme yang *nota bene* menjadi penopang kemajuan Barat dengan berkembangnya sains, teknologisasi dan industrialisasinya juga menyisakan penderitaan dan krisis kemanusiaan, hingga menimbulkan respon keras dengan lahirnya sosialisme-komunisme. Sejarah penjajahan di berbagai kawasan dunia sering kali juga dipandang sebagai implikasi dari liberalisme yang mengambil wajah kapitalisme.

Melalui tulisan ini diharapkan dapat ditelusuri sejauh mana implikasi liberalisme terhadap pendidikan. Mengingat realitas sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa di *habitat aslinya*, yakni Eropa, liberalisme juga menjadi penopang kemajuan di berbagai aspek kehidupan, maka secara lebih spesifik tulisan ini juga diarahkan dalam rangka penelusuran terhadap berbagai dampak positif dan negatifnya. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat membangun sikap kritis terhadapnya.

B. Akar Liberalisme sebagai Wacana dan Paradigma

Lahirnya liberalisme² tidak terlepas dari perkembangan mutakhir Barat sejak era *renaissance* dan *Aufklaerung*, yang secara *massive* mendasari

² Liberalism-Liberalisme : 1) Pada mulanya merupakan ajaran teologi dan filsafat tentang kebebasan kehendak. Dalam zaman modern, merupakan teori dan usaha membela kebebasan kehendak. Mereka memahami kebebasan kehendak itu memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. 2) Filsafat modern tentang kebebasan, khususnya difahami oleh mereka yang menganggap bahwa tujuan masyarakat adalah pendirian lembaga-lembaga yang menjadikan tidak perlunya bentuk-bentuk paksaan yang disangkutkutan dengan negara dan pemilikan pribadi atas mereka, lihat Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam*

berbagai perubahan besar dalam kultur dan peradabannya. Liberalisme muncul karena adanya kebutuhan setiap individu di Barat membentuk tata nilai yang mengatur diri mereka sendiri, sebagai dampak atas perkembangan kesadaran humanistik yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta intelektual. Hak-hak eksklusif kelompok tertentu sebagai pemegang otoritas kekuasaan untuk menentukan berbagai kebijakan dan tata aturan yang diwariskan secara turun-temurun digugat meski mengatasnamakan Tuhan. Ini dikarenakan adanya kebutuhan setiap individu untuk ikut serta membentuk tata aturan dan nilai yang mengatur diri mereka sendiri.³

Secara konseptual, ini merupakan kelanjutan tradisi berfikir Yunani kuno yang mengedepankan otoritas rasio dan mengesampingkan mitos ataupun tradisi. Meski secara diskursif para filosof seperti, Socrates, Plato dan Aristoteles terdapat perbedaan pandangan tentang tingkat kemampuan manusia dalam berfikir, namun tradisi Yunani yang sudah terbiasa dengan pola pikir rasional dan pragmatis dihidupkan kembali, di mana manusia diberi hak merumuskan sendiri tata nilainya sendiri. Hukum dan tata nilai yang dibuat manusia selanjutnya memiliki kekuasaan di atas manusia, yang karenanya ketaatan hukum tumbuh bukan karena keterpaksaan, rasa takut atau kepasrahan, melainkan kesadaran swadisiplin.⁴

Pola berfikir semacam ini sempat mengalami kemandegan, ketika pada abad pertengahan kebebasan berfikir berada di bawah bayang-bayang gereja. Gerakan *renaissance* dan *Aufklaerung* membangkitkan

Filsafat, (Yogyakarta : Liberty, 1988), 48; Liberalisme (latin, liber, bebas), sejumlah aliran yang tumbuh di Eropa Barat pada abad ke-18 dan 19 dan yang berpangkal pada kebebasan individu, secara ekstrem dapat menuju individualisme. Lihat Dick Hartoko, *Kamus Populer Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 55.

³ John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, terjemahan Ari Setyaningrum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 73-4.

⁴ Yunani memulai perkembangan yang sangat menakjubkan, yang sering disebut dengan keajaiban Yunani (*Greek Miracle*), ditandai dengan lahirnya para filosof besar. Masyarakat Yunani sudah mapan dalam penataan sistem politik yang ditandai dengan beberapa ciri: otonomi, swasembada dan kemerdekaan. Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani dari Thales ke Aristoteles*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), halaman 14-21. Pola kebudayaan semacam itu kemudian dilanjutkan bangsa Romawi yang menguasai hampir seluruh Eropa, Asia Minor, Babilonia, Mesir, bahkan daratan Indus sekitar satu milenial. Jan M. Romein, *Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*, (Bandung- Djakarta -Amsterdam: Ganaco NV, 1956), 27-28.

kembali tradisi humanisme Yunani, di mana pemikiran murni menjangkau keluasan ruang dan kedalaman waktu. Humanisme menekankan pada kebutuhan manusia akan kesejahteraan yang bersifat kekinian, di dunia. Dalam diskursus kefilosofan, humanisme memandang individu rasional sebagai nilai tertinggi, yang ditujukan untuk membina perkembangan kreatif dan moral individu dengan cara bermakna dan rasional tanpa merujuk pada pandangan-pandangan adikodrati. Pemberian tempat istimewa terhadap rasionalitas dengan sendirinya juga berarti penghargaan terhadap hak-hak individu. Masyarakat Barat tidak saja diliputi pemikiran rasional dan empiris, melainkan juga menjadi masyarakat yang pragmatis-utilitarianis, dan di sisi lain hedonis, di mana norma-norma eskatologis tersisihkan oleh norma-norma yang ditentukan sendiri oleh manusia.

Gagasan yang pernah membeku selama abad pertengahan tersebut bangkit kembali dan diperkokoh secara konseptual oleh para pemikir sejak era *renaissance* dan modern. Implikasi paling nyata atas lahirnya kembali paham liberal paling tampak pada pemikiran-pemikiran politik, di mana kaum *Monarchomachs*, penentang raja, mempertegas konsep kedaulatan rakyat dengan argumen-argumen duniawi, dan mengesampingkan dogma agama. Sebagai dampak lanjutnya, rakyat menjadi lebih membutuhkan parlemen sebagai agen rakyat dari pada raja, agen Tuhan. Tuntutan tersebut dijawabantahkan ke dalam sekularisasi yang menandai berakhirnya kekuasaan agama, dalam hal ini gereja, atas negara dengan adagium "*Berikan kepada kaisar hak kaisar, dan berikan kepada Tuhan hak Tuhan*".⁵

Seiring melemahnya kesakralan raja, Revolusi politik Eropa khususnya Perancis dan Inggris yang berpadu dengan tuntutan akan revolusi sosial dan ekonomi, merebak dengan mengetengahkan jargon *liberté*, *égalité* dan *fraternité*. Pada tataran politik, kesadaran ini melahirkan

⁵ Arief Budiman, *Ilmu Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 25-29. Simak pula Markoff, halaman 82-4. Meski sekulerisasi berarti pemisahan antara urusan dunia dan keakhiratan, namun dalam kebijakan Barat, terutama ketika berhadapan dengan bangsa lain, motivasi keagamaan belum dapat dihilangkan hingga menjelang abad 21 sekalipun. Sentimen antar sekte Nasrani sendiri bahkan sempat berujung pada pertikaian dan perang antar sekte semasa *religious war*. Donald Kagan, Steven Ozment dan Frank M. Turner, *The Western Heritage*, Volume I, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), 405-429. Simak pula ulasan Hoodbhoy, 41-42.

keinginan berbagai kelompok suku bangsa untuk membangun komunitas (negara) sendiri dan melahirkan republik-republik kecil di Eropa. Kesadaran komunal tersebut mengalami pengentalan atas dasar berbagai ikatan kepentingan yang kemudian melahirkan faham nasionalisme. Faham ini meruntuhkan dominasi feodalisme yang kokoh di Eropa sejak abad ke-8 dan menumbuhkan tatanan baru yang memungkinkan aktualisasi hak-hak individu. Tatanan baru tersebut dikenal dengan istilah demokrasi, yang pada awalnya masih bersifat elitis, ajang kelompok elite sosial dan ekonomi yang memiliki nilai tawar tinggi terhadap penguasa feodal.⁶

Dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai liberal-kapitalis, Barat menawarkan Demokrasi konstitusional sebagai tatanan politik berdasarkan hukum (*rule of law*). Demokrasi Barat menjanjikan akses sama pada setiap individu dan kelompok untuk menyatakan pendapat dan mengakses kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan, demokrasi sering diselenggarakan dengan sistem perwakilan yang dilaksanakan melalui wakil-wakil masyarakat yang dipilih secara berkala, bebas dan melalui persaingan terbuka untuk meraih kekuasaan politik.⁷

Kebebasan tersebut juga berimplikasi luas dalam masalah ekonomi, di mana liberalisme dalam perkembangannya mendasari tumbuhnya kapitalisme. Terlebih kebebasan berfikir dan berkreasi. Liberalisme juga berdampak luar biasa besar terhadap perkembangan sains dan teknologi di Barat yang dijadikan sebagai penopang pesatnya industrialisasi. Dalam perkembangan selanjutnya bahkan disinyalir motif kapital inilah yang mendominasi kecenderungan Barat. Sehingga seluruh aspek tindakan Barat dalam lapangan sosial, budaya dan politik sepenuhnya diabdikan dalam rangka kepentingan kapital.

Era liberal-kapital telah menempatkan pemilik modal menjadi penentu arah kebijakan politik, distribusi kesejahteraan, bahkan tata nilai. Kesenjangan sosial yang sangat tegas antara kelompok kaya dan miskin, antara majikan dan buruh semakin tak terjembatani akibat konsentrasi modal, termasuk tanah pada segelintir orang. Kebebasan yang semula ditujukan sebagai pembukaan akses setiap individu justeru membuka lahan persaingan yang tidak berimbang. Kebebasan hanya

⁶ John P. McKay, Benneth D. Hill dan John Buckler, eds., *A History of World Societies*, (Boston, et.all.: Houghton Mifflin Company, t.t.), 87-88.

⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 134-135.

melapangkan jalan bagi yang kuat mendominasi serta mengeksploitasi yang lemah.

Sebagai respon atas menguatnya liberalisme yang mengambil wajah kapitalisme, muncullah ideologi politik yang semula berbasis pemikiran sosialisme sebagai antitesa. Secara lebih ekstrem sosialisme berkembang dengan mengambil bentuk komunisme, yang oleh para penganutnya seringkali diklaim sebagai tafsiran paling autentik atas sosialisme. Paham liberalisme-Kapitalisme dinilai sebagai biang ketidakadilan sosial, di mana pola pikir Darwinian, *survival by the fittest*, sedemikian kokoh menopang tegaknya hukum alam dalam belantara modernitas.

Di tengah situasi seperti ini komunisme memperoleh lahan persemaian dengan berpijak pada pemikiran Marxisme dan Leninisme. Pemikiran Marx menjadi antitesa atas liberalis-kapitalis yang dianggap menindas dan merendahkan martabat manusia. Mereka menawarkan perlawanan sebagai dialektika perubahan. Kaum proletar harus merebut kekuasaan negara agar dapat membangun diktator proletariat. Mereka menawarkan demokrasi yang berbeda, di mana perjuangan kaum proletar merebut kekuasaan melalui revolusi, mereka menyebutnya sebagai perjuangan demokrasi (*the battle of democracy*). Dalam hal ini, demokrasi dimaknai sebagai suatu sistem pemerintahan di mana kelas proletar berkuasa menjalankan kekuasaan atas nama dan untuk kepentingan rakyat. Diktator proletar sendiri oleh Marx ditempatkan sebagai fase pendahuluan sebelum tercapainya penghapusan negara (*withering away the state*) dan masyarakat tanpa kelas (*classless society*) dalam jangka panjang.⁸

Dengan berpijak pada pemikiran Marx, setelah faksinya mampu merebut kekuasaan Lenin memperkenalkan konsep *vanguard*, di mana kesadaran revolusioner atau kesadaran kelas menuntut dorongan kelompok elit proletar sebagai penggerak, yang dikenal dengan politbiro. Kelompok inilah yang kemudian menjadi penguasa dominan dalam demokrasi Marxis-Leninis. Terkonsentrasinya kekuasaan pada kelompok politbiro dalam perkembangan selanjutnya melahirkan despotisme, sebab pembentukan dan pengawasan politbiro tidak didasarkan atas kehendak rakyat, melainkan oleh pihak yang merasa lebih tahu mengelola negara.

⁸ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 309-310.

Karena itu, demokrasi Marxis-Leninis pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai demokrasi. Ini dikarenakan konsepsi demokrasi Marxis-Leninis terlalu elitis, bahkan menyamai model aristokrasi dalam bentuk yang berbeda. Partisipasi warga negara sama sekali hilang, sebab pemerintah diposisikan sebagai pihak yang paling tahu yang terbaik bagi warga negaranya.⁹

Sebagaimana demokrasi liberal-kapitalis, demokrasi sosial juga berangkat dari akumulasi pandangan hidup dan kesejarahan Barat. Menurut Lichtheim, sebagaimana dikutip Wright dan Eatwall, demokrasi sosial berangkat dari perpaduan trinitas: revolusi politik Perancis, revolusi industri Inggris dan filsafat Hegelian Jerman yang menjadi asal-usul sosialisme. Konsep sosial politik ini semula ditujukan untuk membangun sebuah tatanan politik dan sosial, di mana semua orang dijanjikan mendapat kebebasan yang sama di semua bidang kehidupan melalui solidaritas dan pengorganisasian masyarakat, tapi kemudian direduksi kepada komunisme yang justru menghasilkan situasi yang jauh dari nilai-nilai dasar demokrasi.¹⁰

Meski demikian, pemikiran Marxis-Leninis secara dialektik telah turut mempengaruhi perkembangan demokrasi liberal-kapitalis dengan lahirnya *welfare state* sebagai sintesis. Demokrasi sosial (*social democracy*) lama, setelah dalam wajah komunisme mengalami kegagalan, dalam bentuk baru yang bercirikan anti kekerasan bangkit kembali dengan mendasarkan diri pada pandangan-pandangan sosialisme. Demokrasi sosial memiliki kesempatan meluruskan kembali pemikiran sosialisme yang pernah dipergunakan secara salah untuk kepentingan diktatur-despotik pada pemerintahan komunis. Di Inggris dan kawasan Eropa kontinental, demokrasi sosial menampilkan diri dengan wajah kiri tengah (*center-left*).¹¹

Seiring perjalanan kesejarahan, *rule of law* mengalami perubahan evolutif, terutama didorong oleh perkembangan sosial ekonomi dan politik di berbagai negara. Ekses-ekses yang ditimbulkan oleh kapitalisme

⁹ *Ibid.*, 311-314.

¹⁰ Roger Eatwall dan Anthony Wright (eds.), *Ideologi Politik Kontemporer*, terjemahan R. M. Ali, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004), 108-113.

¹¹ Thomas Meyer, *Sosial Demokrasi dalam Teori dan Praktik, Pengalaman Kaum Sosial Demokrat Jerman*, terjemahan Imam Yudotomo, (Yogyakarta: Central For Social Democratic Studies, 2003), halaman 217-219. Giddens, 1-2.

dengan industrialisasinya serta kemenangan kelompok-kelompok sosialis di beberapa negara Eropa, mengubah pandangan bahwa larangan campur tangan negara dalam urusan warga negara berubah menjadi tuntutan akan keharusan pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negara. Negara yang semula tidak lebih dari penjaga malam (*Nachtwächtersstaat*) berubah menjadi negara kesejahteraan (*Welfare State*) atau negara pelayan masyarakat (*Social Service State*).¹²

C. Pendidikan Liberal: Progresifisme

Sebagai entitas budaya pendidikan dengan sendirinya tidak luput dari keharusan mengikuti *madzhab* berfikir liberal, yang berpijak pada sekulerisme, individualisme dan pragmatisme. Pengaruh tersebut dalam pendidikan di Barat tampak pada mengemukanya paradigma pendidikan progresifisme, yang memandang setiap individu sebagai pihak yang paling tahu yang terbaik bagi dirinya sendiri. Sekolah ataupun guru tidak berhak menentukan tata nilai yang harus dan tidak semestinya bagi siswa-siswanya.¹³

Sekulerisme, dalam arti pemisahan agama dari negara menjadikan masalah nilai, termasuk nilai tradisi dan keagamaan bergeser menjadi urusan individu. Oleh karenanya. Individualisme sebenarnya juga tercermin pada otonomi individu untuk menentukan perlu tidaknya agama dan kepercayaan tertentu. Tidak hanya itu, tata nilai yang sebelumnya bersifat normatif, berpijak pada nilai-nilai eskatologis tergeser ke arah nilai-nilai profan yang ditentukan oleh manusia sendiri. Pendidikan semakin jauh melepaskan tanggungjawabnya terhadap kelangsungan tata nilai keagamaan dan tradisi, dikarenakan setiap individu diberi kesempatan untuk menentukan tata nilai bagi dirinya sendiri.

Kecenderungan ini paling tampak jelas di Amerika yang secara ekstrem mengembangkan budaya liberal, *the liberal road to culture*. Pendidikan diarahkan sebagai proses hidup yang fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh doktrin tertentu. Pandangan progresifisme memberi jalan lapang bagi rasa keingintahuan

¹² Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 59.

¹³ Zuhairini et.al., *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara Jakarta bekerjasama dengan Depag RI., 1995), 20-22.

(*curiosity*), keharusan akan toleransi dan pikiran terbuka (*open-minded*). Dalam praktiknya progresifisme pendidikan menolak otoriterisme dan absolutisme dalam segala bentuk, termasuk yang didasarkan atas agama, politik, etika maupun paradigma epistemologi tertentu.

Sebaliknya, progresifisme pendidikan memberikan kepercayaan penuh terhadap kemampuan alamiah manusia. Pandangan progresifisme pendidikan percaya bahwa manusia mampu memahami, menguasai serta mengatasi alam, tanpa harus bersandar pada realitas adi-kodrati. Untuk itu, dimensi moralitas pendidikan bukan diarahkan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan atau hal-hal yang berdimensi eskatologis. Moralitas pendidikan lebih ditekankan pada kepentingan manusia sebagai individu. Hal ini selaras dengan berkembangnya pola pikir pragmatis-utilitarianis Amerika sebagaimana dikonstruksikan Sanders Piers ataupun John Stuart Mill.

Implikasi pandangan ini terhadap pendidikan tentu sangat luas, mulai dari segi tujuan pendidikan, bahan atau materi yang harus diajarkan, metode dan pendekatan pembelajaran serta bagaimana proses pendidikan harus dievaluasi. Singkatnya, pandangan ini mendasari seluruh aspek dalam penentuan kurikulum pendidikan sebagai implikasi operasionalnya.

Tujuan pendidikan tidak lagi dapat ditekankan pada kepentingan penyelenggara dalam menebarkan misinya di tengah masyarakat. Sebaliknya, pendidikan dituntut mempertimbangkan posisi dirinya sebagai fasilitator masyarakat dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperkembangkan diri. Pendidikan dituntut memenuhi “logika pasar”, dengan pertanyaan apa yang dibutuhkan pasar, dan bukan apa yang hendak ditebar di tengah masyarakat. Apa yang hendak diberikan kepada masyarakat (siswa) bukan terletak pada kebutuhan lembaga untuk menyuguhkannya Artinya, materi pelajaran dalam lembaga pendidikan yang mendasarkan diri pada progresifisme harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalaupun sebuah lembaga masih mengemban misi tertentu, hal itu hanya dapat diporsikan dalam konteks kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*).

Orientasi pendidikan yang terarah pada otonomi mental individual menjadikan metode pengajaran progresifisme pendidikan menuntut penghargaan penuh atas otoritas individual siswa. Siswa merupan subyek utama dalam belajar, di mana guru hanya bertindak

sebagai fasilitator dan motivator saja. Guru tidak memiliki otoritas untuk mendiktekan sesuatu, terlebih dalam hal-hal krusial menyangkut nilai. Proses belajar yang demokratis menjadi elemen penting sebagai strategi pembelajaran, karena pembelajaran model ini menuntut penekanan pada kemampuan problem solving dibanding pemanfaatan otak sebagai penyimpan informasi, hafalan.¹⁴

Seiring menguatnya paradigma liberalis-kapitalis, pendidikan yang semula menjadi wahana pewarisan budaya bergeser menjadi agen kapital. Pendidikan secara simultan beralih posisi sebagai penopang industri. Keberadaan industri seakan menjadi jalan akhir bagi proses pendidikan dengan arah, target serta *reward* yang secara material semakin kongkrit. Situasi ini menempatkan keterkaitan antara pendidikan dan dunia keilmuan pada umumnya menemukan sinergi yang kuat dengan kebutuhan akan peningkatan dinamika kapital. Situasi ini menjadikan dunia pendidikan dapat memperkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagian menjadi komoditas ekonomi. Di sisi lain, kuatnya modal menstimulasi siswa, pendidik dan para ilmuwan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam praktiknya, memang tidak semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait langsung dengan komoditas ekonomi. Namun demikian, konstelasi kemanusiaan yang semakin kompleks dengan dampak-dampak sosial dan politik yang luas telah mengharuskan industri perlu mengendalikan serta mengarahkan dinamika sosial dan politik dalam rangka menunjang dinamika perputaran kapital. Kebutuhan akan perlindungan hukum yang baik bagi setiap kegiatan usaha memerlukan ahli di bidang hukum; kebutuhan akan dukungan kebijakan politik menjadikan ilmu politik tidak dapat diabaikan dalam perikehidupan sosial; dan demikian halnya dengan aspek-aspek sosial dan humanitis lainnya. Oleh karenanya, ilmu-ilmu humaniora juga berkembang pesat di Barat di samping ilmu-ilmu eksakta dan rekayasa teknologi.

Privatisasi sebagai salah satu ciri utama liberalisasi menjadi *trend* sosial Barat, termasuk dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan. Pelimpahan tanggung jawab hidup pada otonomi mental individu menjadikan pendidikan juga berkembang pada kapitalisasi. Kualitas

¹⁴ Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 79.

pendidikan sangat ditentukan kekuatan modal penyelenggara maupun masyarakat yang memanfaatkannya. Nilai-nilai pengabdian yang pada umumnya melekat pada dunia pendidikan meningkat kepada kontrak sosial. Di satu sisi, hal ini memberi peluang meningkatnya daya saing lembaga maupun mutu keluarannya, namun di sisi lain, pendidikan sebagaimana distribusi kapital lebih banyak dapat dinikmati mereka yang memiliki kesiapan materi dibanding sebaliknya.

Dalam situasi ini, daya saing yang dituntut dalam dinamika sosial Barat sangat ditentukan oleh eksistensi individual. Kemampuan individu untuk mengembangkan diri sebaik mungkin menjadi penentu eksistensi dirinya di masa depan. Penjamin masa depan bukan lagi terletak pada komunitas melainkan kembali menjadi tanggung jawab setiap individu. Situasi ini dengan sendirinya mempengaruhi perubahan etos kerja dan pola pikir masyarakat liberal ke arah yang lebih pragmatis.

Dengan demikian, pengaruh liberalisme yang menjangkau berbagai aspek kemanusiaan secara fundamental, implikasi-implikasinya tidak berhenti pada perubahan sistem pengelolaan institusi sosial dan politik. Pengaruh penerapan paham liberalisme dapat menjangkau ranah-ranah individual menyangkut perubahan karakter sosial, politik, kebudayaan bahkan eksistensi tradisi dan agama di tengah percaturan sosial. Pendidikan di tengah atmosfer liberal dihadapkan pada pilihan mengikuti *trend* selera masyarakat yang senantiasa berubah atau bertahan pada idealismenya sendiri.¹⁵

D. Pengaruh Faham Liberal terhadap Dunia Pendidikan Modern

Gerak peradaban Barat yang mengejantah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuahkan dominasi mereka atas berbagai bangsa di belahan dunia. Dominasi yang paling tampak semula mengambil bentuk kolonialisme dan imperialisme, dalam arti penguasaan suatu bangsa atas bangsa lain secara teritorial. Berakhirnya kolonialisme bukan berarti mengakhiri posisi tersebut, sebab imperialisme dalam arti pengaruh suatu bangsa atas bangsa lain dalam hal politik, ekonomi bahkan intelektual.

¹⁵ Mohammad Noor Syam, *Filsafat Kependidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986) 225-226

Kolonialisme Barat yang berlangsung sejak beberapa ratusan tahun lalu meski bagi masyarakat atau bangsa yang berada di bawah dominasi menjadikan hal ini sebagai satu ironi, telah mengawali penyebaran kemajuan Barat pada berbagai bangsa. Sebagaimana produk-produk pemikiran Barat pada umumnya - filsafat, sains, teknologi dan nasionalisme - progresifitas Barat telah membanjiri alam pemikiran dan mempengaruhi visi sosial politik dan kebudayaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Perkembangan dan kemajuan Barat, terutama sejak periode akhir era kolonial, disusul munculnya isu globalisme era komunikasi dan informasi kian mengukuhkan Barat sebagai kiblat negara-negara baru yang umumnya bekas jajahan baik dalam pilihan ideologi, sistem pendidikan, gaya hidup, seni, sistem tatanan sosial politik maupun aspek kehidupan yang lebih luas.

Kokohnya bangunan tata nilai Barat yang terekspresikan ke dalam berbagai isu kontemporer menjadikan masyarakat manapun sulit menghindarkan diri dari keharusan untuk memberikan respon, baik dalam praktik pemerintahan maupun pengelolaan berbagai aspek kehidupan sosial.¹⁶ Secara berangsur-angsur, cara-cara di luar tradisi Barat semakin tergeser digantikan cara-cara yang mengemuka dalam tradisi modernitas Barat. Demikian halnya dengan pendidikan yang semula menjadi wahana pewarisan tradisi juga terseret kecenderungan untuk mengikuti cara maupun pola-pola Barat.

Terlebih sejak kurun akhir masa kolonial, di mana terjadi transformasi budaya Barat pada bangsa jajahan secara besar-besaran. Transformasi tersebut menghasilkan dikotomi budaya, di mana mengikuti cara Barat disebut modern sementara mengikuti budaya sendiri berarti tradisional. Keduanya memiliki konotasi berbeda, bila modern berarti maju, masa sekarang dan ke depan, sementara tradisional berarti masa lalu yang tertinggal. Demikian halnya dengan pendidikan, di mana pendidikan yang mengikuti model dan paradigma Barat dipandang sebagai modern, sedangkan mengikuti warisan sendiri sebagai tradisional.

Transformasi tersebut menghasilkan perluasan modern dan paradigma pendidikan modern khas Barat. Hal ini juga diikuti dengan pergeseran orientasi, sistem maupun cara yang dilakukan dalam

¹⁶ The European union is the prototype, but the softening of boundaries is happening in other parts of the world, too. *The Third Way, The Renewal of Social Democracy*, (Cambridge: Polity Press, 1999), 130.

mengelola pendidikan pada banyak bangsa. Di antara ciri menonjol pendidikan modern adalah pada formalisasi pendidikan dengan seperangkat bukti-bukti formal, tingkatan dan jenjang pendidikan, materi pembelajarannya serta sistem pengelolaannya dalam bentuk persekolahan yang menggunakan mekanisme klasikal dengan gedung dan fasilitas-fasilitas khas Barat.

Formalisasi pendidikan mengambil bentuk sertifikasi keilmuan dan keahlian yang sepenuhnya menjadi otoritas lembaga pendidikan. Kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli dan ilmuwan menempatkan lembaga pendidikan memiliki peran mencetak tenaga-tenaga yang secara spesifik dibekali keahlian dan keilmuan tertentu dengan menempuh pengalaman belajar pada suatu jenjang dan tingkatan pendidikan, di mana pengalaman dan keahlian tersebut dibuktikan secara formal melalui sertifikasi atau ijazah.

Materi pendidikan tidak lagi menekankan dimensi etis-dan moral semata, bahkan semakin menggusurnya, digantikan dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pengembangan hidup. Pendidikan modern telah memungkinkan banyak aspek yang sebelumnya kurang diberikan perhatian justeru menjadi orientasi dominan. Besarnya minat masyarakat pada sains dan teknologi menjadikan porsi keilmuan ini jauh lebih besar dibanding minat pada agama. Pada kasus Indonesia hal ini dapat dicermati dari kecenderungan minat pembelajar pada bidang pendidikan umum dibanding agama.

Pendidikan modern telah mendorong dinamika sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun berbagai temuan yang didasarkan atas penelitian ilmiah di berbagai bidang. Bagi dunia pendidikan sendiri kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan kemampuan manusia mengembangkan model-model pendidikan, yang menjadikan pendidikan formal sebagai kebutuhan setiap orang, masyarakat, bangsa dan negara.

E. Dampak Liberalisme Pendidikan

Sebagai sebuah sistem, pendidikan liberal sudah barang tentu tidak lepas dari sisi positif dan negatif, terutama terkait dengan dimensi perkembangan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagian besar memberi manfaat luas pada umat manusia juga merupakan buah dari liberalisasi pendidikan. Pendidikan memiliki

kesempatan mengembangkan berbagai cabang keilmuan dan teknologi secara independen tanpa kekhawatiran terhadap berbagai tekanan sebagaimana pengalaman Galileo dan Copernicus.

Eksplorasi ilmu pengetahuan yang semakin banyak menguak misteri alam dan kemanfaatannya bagi kehidupan umat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan lahan pertanian yang kian menyempit tidak dengan sendirinya menurunkan produksi. Dengan meningkatnya kemampuan rekayasa bioteknologi manusia bahkan mampu meningkatkan produksi jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

Modernitas pendidikan yang semula berpijak pada pandangan liberal telah banyak membebaskan masyarakat bangsa dari keterbelakangan. Meski tidak sepesat perkembangan pada bangsa Barat, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tuntutan yang tidak dapat ditolak. Pendidikan dengan paradigma liberal telah menggeser pandangan-pandangan mistik dan tertutup ke arah pola pikir bebas dan terbuka. Dalam konteks kebudayaan Islam, modernisasi pendidikan yang diapresiasi kalangan Islam telah banyak menyumbangkan perubahan pemahaman keagamaan maupun peningkatan kualitas kehidupan sosial umatnya.¹⁷

Meski demikian, sebagaimana keprihatinan Friere, Illich ataupun From, liberalisasi pendidikan rupanya juga berdampak pada munculnya situasi dehumanisasi. Liberalisme yang semula berangkat dari kesadaran humanisme justru berujung pada dehumanisasi. Situasi ini disebabkan adanya kecenderungan menempatkan pendidikan sebagai penopang perputaran modal. Akibatnya, setiap individu semakin kehilangan eksistensinya, mengingot keberadaan mereka dan dunia pendidikan pendidikan lebih banyak tertuju pada kepentingan memenuhi komponen produksi.

Masyarakat menjadi semakin kehilangan kehendak dan kreatifitasnya, karena jalan hidup mereka yang semakin mekanistik. Roda perputaran kapital menjadi instrumen yang menentukan pola pikir bahkan harapan-harapannya, dan bukan sebaliknya. Manusia semakin tergantung pada perputaran mesin-mesin produksi dan kepentingan kapital dibanding kehendak dirinya untuk mengekspresikan eksistensi sebagai manusia, yang berfikir dan berperasaan. Dalam situasi tertentu,

¹⁷ Paulo Freire, et.al., *Menggugat Pendidikan, Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 108-129.

manusia bahkan kehilangan harkat kemanusiaannya akibat “memper-tuhankan” materi di atas nilai-nilai hakiki kemanusiaan.

Nilai-nilai tradisi dan budaya yang sebelumnya memberikan harga diri suatu komunitas secara berangsur tergusur. Setiap entitas budaya seolah harus lebur ke dalam satu paradigma, modernitas. Akibatnya, banyak masyarakat bangsa jatuh ke dalam ambiguitas budaya. Di satu sisi mereka terikat oleh tradisi dan kebudayaan warisan nenek moyangnya, di sisi lain juga dihadapkan pada keharusan menjadi manusia baru yang seolah tercerabut dari akar tradisi dan budayanya.

F. Penutup

Sebagai paradigma berfikir dan kemasyarakatan, implikasi liberalisme terhadap pendidikan tampak pada perubahan paradigma maupun model pendidikan secara besar-besaran, mulai dari orientasi, lapangan pembelajaran maupun pola belajar. Perubahan tersebut pada dasarnya mengekspresikan pergeseran cara berfikir manusia terhadap diri dan lingkungannya. Pergeseran kebutuhan menjadikan pendidikan juga bergeser, bukan lagi sebagai kebutuhan komunitas melainkan lebih terfokus pada kebutuhan individual.

Bagi dunia pendidikan, situasi ini tentu disertai munculnya dampak positif dan negatif baik internal pendidikan sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Nilai positif dari dinamika tersebut tampak pada perubahan cara hidup, cara berfikir dan kemampuan manusia memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Namun demikian, meningkatnya dinamika kemanusiaan tersebut pada situasi tertentu justru tidak jarang menggeser harkat kemanusiaannya bukan lagi sebagai pengendali produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan sebaliknya. Liberalisme yang semula dimaksudkan untuk memanusiakan manusia, berbalik arah, di mana manusia semakin tidak-dimanusiakan (dehumanisasi) oleh karya-karyanya sendiri.

Daftar Pustaka

- Bertens, K, *Sejarah Filsafat Yunani dari Thales ke Aristoteles*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Budiman, Arief, *Ilmu Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Chan, Stevan M., *Pendidikan Liberal*, tjm. Abdul Munir Mul Khan, Umi Yawisah, Yogyakarta : Kreasu Wacana, 2002.
- Eatwall Roger dan Anthony Wright (eds.), *Ideologi Politik Kontemporer*, terjemahan R. M. Ali, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004.
- Freire, Paulo, et.al., *Menggugat Pendidikan, Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Hartoko, Dick, *Kamus Populer Filsafat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Kagan, Donald, Steven Ozment dan Frank M. Turner, *The Western Heritage*, Volume I, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987).
- Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, terjemahan Ari Setyaningrum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- McKay, John P., Benneth D. Hill dan John Buckler, eds., *A History of World Societies*, Boston, et.all.: Houghton Mifflin Company, t.t.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Meyer, Thomas, *Sosial Demokrasi dalam Teori dan Praktik, Pengalaman Kaum Sosial Demokrat Jerman*, terjemahan Imam Yudotomo, Yogyakarta: Central For Social Democratic Studies, 2003
- Mudhofir, Ali, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Romein, Jan M., *Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*, Bandung- Djakarta -Amsterdam: Ganaco NV, 1956
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Syam, Mohammad Noor, *Filsafat Kependidikan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1986
- The European union is the prototype, but the softening of boundaries is happening in other parts of the world, too. *The Third Way, The Renewal of Social Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1999.
- Zuhairini et.al., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara Jakarta bekerjasama dengan Depag RI., 1995.